

ABSTRAK

PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI TAHANAN DAN NARAPIDANA

(Studi Kasus di LP. Tanjung Gusta Medan)

O L E H

RIZKI MUSLIM SITEPU

NPM : 09 840 0113

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan yang akan dilakukan adalah sekitar kewenangan yang diberikan kepada Lembaga Pemasyarakatan dalam hal penegakan hukum dan perlindungan hak asasi tahanan dan narapidana dengan mengambil penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan.

Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana peranan lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi tahanan dan narapidana dan bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi tahanan dan narapidana di LP Anak Tanjung Gusta Medan.

Untuk mendukung pembahasan maka dilakukan penelitian lapangan di LP. Anak Tanjung Gusta Medan dan juga penelitian kepustakaan baik itu dari peraturan perundang-undangan maupun teori hukum.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan Lembaga pemasyarakatan anak dalam perspektif hukum positif di Indonesia telah diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undang sehingga dengan demikian keberadaan lembaga pemasyarakatan bertugas dan berfungsi dalam hal pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, sehingga apabila mereka kembali ke tengah masyarakat mereka dapat berfungsi sebagai warga masyarakat. Pelanggaran pidana yang dilakukan anak adalah suatu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan oleh sebab itu anak harus mendapatkan perlindungan dalam hal mempertanggung jawabkan perbuatannya baik itu di depan pengadilan maupun sewaktu menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak. Peran pembinaan lembaga pemasyarakatan anak terhadap anak pelaku tindak pidana adalah dilakukan dengan suatu sistem tertentu dimana anak diberikan kegiatan positif selama menjalani pembinaan serta juga diberikan hak-hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hal-hal lainnya yang menjelaskan tentang perbuatan yang merupakan tindak pidana.